

DAMPAK PENERAPAN APLIKASI SIMASET, PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Anita Ema Kurniawan^{1*}, Suwandi², Dwi Puji Rahayu³, Indrian Supheni⁴

^{1*}anitaema20@gmail.com ^{2*}suwa3019@gmail.com ^{3*}dwipujirahayu@stienganjuk.ac.id

^{4*}indriansupheni@stienganjuk.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nganjuk¹²³⁴

Abstract

The phenomenon of changing attitudes in utilizing technology in the field of accounting is also applied in the accounting recording system in the Nganjuk district government to help improve the quality of financial reports with the latest SIMASET system with the latest design and filters that are more efficient to use. The study aims to analyze the impact of the implementation of the SIMASET application, management of regional assets (BMD) and regional financial management on the quality of regional financial reports. Therefore, a quantitative research type was used with a sample of 110 respondents from 55 agencies and bodies that attended the adjustment meeting in the preparation of regional financial reports with the responses given on the g-form. Based on the multiple linear regression analysis that has met the assumption of normal distribution, it can be concluded that partially and simultaneously there is a positive and significant influence of the implementation of the SIMASET application, management of regional assets (BMD) and regional financial management on the quality of regional financial reports.

Keywords: SIMASET Application, BMD Management, Regional Finance, Quality of Regional Finance.

Abstrak

Adanya fenomena perubahan sikap dalam memanfaatkan teknologi dalam bidang akuntansi juga diterapkan dalam sistem pencatatan akuntansi di pemerintah daerah kabupaten Nganjuk guna membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan sistem terbaru SIMASET dengan desain dan filter terbaru yang lebih efisien digunakan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan aplikasi simaset, pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karenanya digunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pengambilan sampel sebanyak 110 responden dari 55 instansi dan badan yang mengikuti rapat penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan daerah dengan respon yang diberikan pada *g-form*. Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang sudah memenuhi asumsi distribusi normal dapat disimpulkan bahwa secara parsial dan secara simultan terbukti adanya pengaruh positif dan signifikan dari penerapan aplikasi simaset, pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata kunci: Aplikasi SIMASET, Pengelolaan BMD, Keuangan Daerah, Kualitas Keuangan Daerah.

Pendahuluan

Roda pemerintahan wajib dijalankan dengan tujuan agar bisa meningkatkan kesejahteraan warga negara, selayaknya yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Berperan menjadi organisasi di bidang publik, pemerintah harus mampu melayani warga negaranya dengan cara yang efektif serta efisien. Pengelolaan yang dijalankan pemerintahan mencerminkan mutu pemerintah dalam melayani masyarakat. Kini masyarakat mengharapkan agar organisasi pemerintah saat ini memiliki cara pengelolaan yang teratur. Peran administrasi sendiri sebenarnya lebih luas dari sekedar penggunaan sumber daya secara efisien dan ekonomis. Namun tata pemerintahan yang baik adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk membangun institusi sosial yang kuat dan menjadikan pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, demokratis, dan akuntabel. (Purnomo et al., 2020).

Good government governance bisa diwujudkan dalam pemerintahan kontemporer dengan tujuan menghindari dari penyelewengan berupa penyalahgunaan pekerjaan umum untuk kepentingan pribadi melalui ciri-ciri tata kelola yang baik antara lain: transparan, bertanggung jawab, adil, wajar, demokratis, partisipatif, dan responsif (Patty, 2019). Akuntabilitas dalam pemerintahan penting untuk mempertanggungjawabkan dana publik. Laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan dan mutu yang baik (Marfuah et al., 2023). LKPD harus dipersiapkan dengan baik, memenuhi ketentuan yang diputuskan dan memiliki kualitas yang baik dalam hal keterkaitan dan kecakupannya (Yudistira & Rohman, 2022). Adanya LKPD yang berkualitas, maka masyarakat dan lembaga pengawas keuangan daerah juga dapat memantau upaya pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan daerah dengan mutu yang bagus berdasar pada ketentuan akuntansi yang diberlakukan.

Pemerintah daerah wajib mengungkapkan laporan keuangan berkualitas guna kebutuhan pengelolaan, perencanaan, dan dalam mengambil putusan di masa yang akan mendatang. (Leunupun et al., 2022). Dalam upaya membuat hasil laporan keuangan daerah dengan mutu bagus serta efektif, ada bermacam aspek yang mempengaruhinya. Menurut Sukma et al. (2023), laporan keuangan yang berkualitas dipengaruhi secara kuat adanya sistem informasi dalam mengelola keuangan daerah serta dalam hal mengelola aset tetap daerah. Fajri & Fuadi (2021), variabel yang juga berperan penting dalam meningkatkan mutu laporan keuangan tata usaha barang milik negara serta pelaksanaan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara. Hal tersebut membuktikan bahwasannya dalam membentuk laporan keuangan daerah memiliki faktor yang membawa pengaruh yakni dari variabel penerapan sistem informasi baik dalam mengelola aset milik daerah/negara, mengelola barang milik daerah ataupun negara dan juga pengelolaan laporan keuangan daerah secara keseluruhannya.

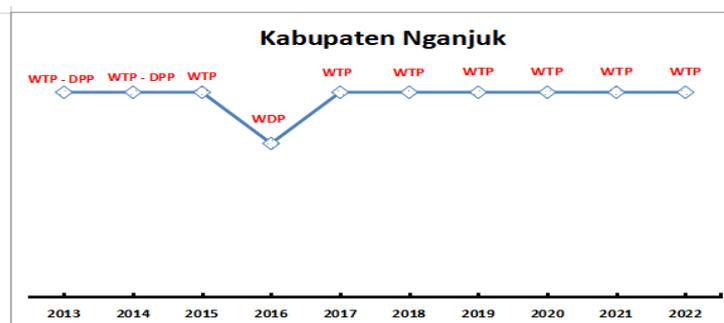
Perkembangan teknologi dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah berbasis komputerisasi semakin baik seiring meningkatnya beban kerja dan kompleksitas dalam menunjang akuntabilitas keuangan daerah (Yusri, 2020). Manajemen memiliki peran interpersonal, informational, dan decisional dalam perusahaan. Sistem informasi manajemen mendukung pengelolaan yang maksimal (Lisdamayanti et al., 2022). Sistem informasi manajemen daerah yang berintegrasi dengan manajemen aset yang baik dapat membantu pemerintah mencapai akuntabilitas dalam laporan keuangan guna memaksimalkan kinerja, mengurangi biaya, dan memberikan nilai tambah (Lestari & Yadiati, 2022). Apalagi dalam manajemen aset daerah yang terdiri dari berbagai wilayah hingga desa diperlukan kemampuan mengelola aset dan pendapatan daerah sesuai Peraturan Pemerintah RI, 2005 nomor 56 (Nasution & Nurwani, 2021). Hal inilah, yang mendorong para teknisi IT di lingkungan pemerintah daerah selalu memperbarui sistem

informasi manajemen pengelolaan aset menjadi sistem yang bekerja secara terpadu dalam mengawasi seluruh aset yang berada di pemerintahan daerah hingga pemerintah desa.

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan tidak hanya dari sisi sistem IT yang terpadu adalah pengelolaan barang milik daerah (BMD). Menurut Yusri (2020), Bagi pihak kepentingan seperti, masyarakat umum akan selalu mengharapkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dengan informasi pencapaian pembangunan secara berkala serta pengelolaan pemerintah yang teratur dalam mengelola warisan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Sedangkan menurut (Poae et al., 2023), pengelolaan BMD sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 agar dapat dikelola mulai dari tahap perencanaan hingga dilakukan pengawasan yang baik guna menambah tingkat efisiensi, efektivitas, serta mewujudkan penilaian yang baik bagi pemerintah daerah. Menurut Mahmudi (2018:11), jika pengelolaan BMD dilakukan dengan strategi yang tepat, maka tidak akan menyebabkan in-efisiensi dalam pemborosan biaya pembelian dan pemeliharaan aset berlebihan dan akan mencapai target yang diharapkan secara maksimal. Hal inilah yang membuat pentingnya pengelolaan BMD demi menekan pembelanjaan daerah yang boros (Firzada, 2021).

Faktor yang harus diperhatikan juga dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah dari pengelolaan laporan keuangan di tingkat internal daerah. Menurut Baso et al. (2023), pengelolaan keuangan daerah yakni semua aktivitas yang mencakup pelaksanaan, perencanaan, pelaporan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal mengelola keuangan daerah bisa dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, dan bentuk upaya dalam mengelola keuangan pemerintah secara ekonomi, efektif dan efisien (Leunupun et al., 2022). Jika sistem pengelolaan sudah didukung dengan sistem yang canggih diharapkan pengelolaan secara keseluruhan aset maupun dalam mengontrol pengeluaran juga akan semakin baik, sehingga adanya pengelolaan keuangan yang baik berdasar pada ketentuan akuntansi dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang tersedia guna mendapatkan opini wajar dari BPKP sebagai bukti predikat laporan keuangan yang disajikan sudah berkualitas (Pramesti & Damajnti, 2020). Karena hasil dari pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam akan sangat mempengaruhi pihak kepentingan seperti investor, pemerintah pusat dan pihak lainnya sebagai salah satu informasi dalam pengambilan keputusan serta sebagai akuntabilitas dari pemerintah daerah kepada publik.

Bagi seluruh daerah tanpa terkecuali pemerintah kabupaten Nganjuk juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam terus menambah mutu laporan keuangan yang tersedia. Hal ini seiring dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Pemda Kabupaten Nganjuk yang melibatkan adanya penyalahgunaan dana milik pemerintah di tingkat desa maupun pemda, yang membuat beberapa kepala desa maupun kepala daerah kabupaten harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara hukum. Pemerintah daerah dalam menyajikan laporan harus bersifat relevan (Sukma et al., 2023). Berbagai upaya inovasi dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk seiring relevansi dari hasil evaluasi opini audit dari BPKP atas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk selama 10 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut:



Gambar 1 Hasil Evaluasi Laporan Keuangan Kabupaten Nganjuk Periode

Berdasarkan hasil pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan yang cukup ekstrem dari sebelum penggunaan SIMBADA yakni pendapat paling rendah yang mencakup disclaimer menjadi Wajar Dengan Pegecualian (WDP). Fenomena ini juga dikonfirmasi adanya pernyataan Hadi (2024) Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Nganjuk, terdapat permasalahan aplikasi SIMBADA yang digunakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah (BMD) dirasa kurang efisien dan belum mampu terintegrasi dengan sistem pencatatan aset-aset pengelolaan keuangan pemerintah bidang lainnya. BPKAD Kabupaten Nganjuk yang menggunakan SIMBADA dalam pencatatan aset BMD yang hanya terbatas dalam pemanfaatan dan pengadaan saja. Permasalahan dari SIMBADA karena banyak kode pengadaan barang yang harus dihafal, staff pencatatan inventarisasi merasa kesulitan menghafalkan semuanya dan rentan terjadi kekeliruan akan yang menghambat proses pelaporan. Oleh karena itu pada periode 2016 menyebabkan Pemda Kabupaten Nganjuk melakukan evaluasi dengan pembaharuan sistem informasi akuntansi yang baru dengan sistem manajemen yang lebih terpadu dari tingkat pemerintah desa diseluruh daerah di Kabupaten Nganjuk yang bernama SIMAset. SIMAset ini sebagai sistem informasi akuntansi manajemen aset terpadu guna membantu pengelolaan keuangan daerah di bidang aset daerah dengan desain input yang lebih mudah digunakan dengan pengkodean akuntansi lebih sederhana dalam meminimalisir kesalahan proses masukan data. Karena selama proses masukan data terkait pendapatan dan pengeluaran harus sesuai dengan laporan yang diterima dari berbagai instansi, badan dan pemerintah desa yang menerima anggaran maupun sebagai dalam melaporkan pendapatan kepada daerah. Berikut ini kesesuaian antara anggaran dan realisasi yang sudah dicapai dari adanya penerapan SIMAset guna meningkatkan kualitas laporan keuangan Kabupaten Nganjuk;



Gambar 2 Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nganjuk 2020-2023 (Sumber; Diolah Peneliti Data Sekunder BPS, 2023)

Berdasarkan grafik di atas, selama periode 2020-2023 pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang merupakan aset milik daerah menunjukkan realisasi yang lebih tinggi dari apa yang sudah ditargetkan dengan pencapaian paling tinggi senilai Rp. 4,43 Miliar dari yang ditargetkan hanya sejumlah Rp 3,74 miliar. Sedangkan, jika dibanding belanja modal yang dikeluarkan rata-rata selama periode 2020-2023 mencapai Rp 294,43 miliar lebih tinggi dari rata-rata yang dianggarkan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang hanya senilai Rp. 290,17 miliar dengan pengeluaran belanja modal tertinggi di periode 2022 yang hanya di anggarkan senilai Rp. 204,90 miliar, tetapi realisasi belanja periode 2022 senilai Rp. 445,25 miliar. Ini jauh lebih tinggi sebesar Rp 240,35 miliar dengan indikasi bahwa di periode 2022 terjadi peningkatan biaya dalam pengelolaan aset-aset tetap milik daerah ataupun aset lainnya yang tidak sesuai perencanaan. Pada pengeluaran biaya guna menjalin hubungan dengan pihak lain dalam memaksimalkan pemanfaatan aset yang terbilang masih rendah. Oleh karenanya, upaya dalam mengelola keuangan yang tersistematis wajib diterapkan guna menambah pendapatan dan mengurangi belanja serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Upaya ini dijalankan dengan tujuan memperoleh laporan keuangan yang bermutu, pemerintah seharusnya mempunyai akuntabilitas laporan keuangan yang kredibel, cakap dan dapat dipercaya tingkat efisiensi maupun efektivitas realisasi penggunaannya secara tepat waktu ke badan pemeriksa keuangan daerah untuk diaudit.

Untuk mendapatkan kualitas laporan keuangan yang tersistematis berdasar pada hasil temuan terdahulu seperti yang dilakukan Lestari & Yadiati (2022) dan Baso et al. (2023) menunjukkan adanya pelaksanaan sistem teknik informatika dalam pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap mutu laporan keuangan daerah. Begitu juga dalam penelitian (Fajri & Fuadi, 2021) membuktikan bahwasannya penatalaksanaan barang milik daerah juga memberi dampak yang signifikan dan baik terhadap mutu laporan keuangan. Tetapi hasil temuan tersebut bertentangan dengan beberapa penelitian lainnya seperti (Poe et al., 2023) yang menunjukkan bahwa perencanaan BMD yang menjadi bagian dari pengelolaan BMD mempunyai dampak buruk serta tidak relevan dengan mutu laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan temuan Leunupun et al. (2022) menyatakan bahwasannya, dalam mengelola keuangan daerah tak signifikan dalam memberikan pengaruh terhadap mutu laporan keuangan daerah.

Adanya research gap dan beberapa fenomena yang terjadi inilah yang melatarbelakangi peneliti ingin melakukan analisis dengan tujuan untuk melakukan pembuktian secara empirik terkait pengaruh penerapan SIMAset, pengelolaan BMD serta upaya dalam mengelola keuangan daerah terhadap mutu laporan keuangan. Fenomena tersebut didasarkan pada peneliti ingin mengukur seberapa jauh peran teknologi sistem informasi manajerial dan seberapa jauh sistem pengendali internal melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nganjuk guna meningkatkan tanggung jawab serta keterbukaan mutu laporan keuangan daerah bagi seluruh penggunanya.

Metode Penelitian

Untuk melakukan pembuktian secara empiris peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif dari populasi penelitian adalah OPD Badan dan instansi Pemerintah Kabupaten Nganjuk 7.552 orang berasal dari 55 organisasi pemerintah. Sampel yang digunakan sebanyak 110 sampel yang diambil secara *purposive sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan yakni kuesioner tertutup. Sementara Teknik analisis memanfaatkan analisis regresi linier berganda.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil rekapitulasi pelanggan yang bersedia melakukan pengisian kuesioner secara *g-form* dan secara langsung dapat dikategorikan sesuai jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rekapitulasi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen
Laki-laki	42	42%
Perempuan	86	86%
Total	110	100.0%

Sumber: Data Primer (2024)

Berdasarkan pengelompokan responden yang bersedia menjadi sampel penelitian menunjukkan sebagai besar merupakan pegawai organisasi daerah Kabupaten Nganjuk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 86% (86 orang) dan sebanyak 42% (42 orang) adalah laki-laki.

Deskripsi Variabel

Berdasarkan data pelanggan terkait variabel kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten. Berikut respon pelanggan terkait intensitas kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk :

Tabel 2 Kriteria Pencapaian Pilihan Jawaban Responden

	Jumlah Responden			
	Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan Aplikasi SIMASET	Pengelolaan BMD	Pengelolaan Keuangan Daerah
Sangat Tinggi	6	3	4	12
Tinggi	30	46	39	33
Sedang	41	27	28	30
Rendah	23	24	33	27
Sangat Rendah	10	10	6	8
Total	110	110	110	110

Uji Normalitas

Hasil uji bell shaped juga peneliti dukungan hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov Z dalam melihat seberapa besar kemungkinan penyimpangan data atau nilai Asymptotic significance 2-tailed. Berikut hasil uji normalitas K-S pada penelitian ini:

Tabel 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		110	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000	
	Std. Deviation	1.04900618	
Most Extreme Differences	Absolute	0.078	
	Positive	0.078	
	Negative	-0.044	
Test Statistic		0.078	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0.094	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	0.098	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.090
	Upper Bound	0.105	

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Sumber: Output Statistik (2024)

Berdasarkan hasil uji normalitas K-S menunjukkan nilai *Asymptotic significance 2-tailed* = 0.094 > 0.05 yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara data dengan kurva normal yang artinya bahwa data mengikuti distribusi normal. Sehingga data mampu mewakili data populasi pegawai OPD yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan dalam menilai kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.

Koefisien Determinasi

Berikut ini hasil nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil regresi linier berganda yang dilakukan pada sampel penelitian dalam menilai pengaruh penerapan aplikasi SIMASET, pengelolaan BMD dan pengelolaan laporan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk ditunjukkan pada tabel model summary:

Tabel 4 Hasil Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,982 ^a	0,965	0,964	1,064
a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerapan Aplikasi SIMASET, Pengelolaan BMD				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah				

Sumber: Data Output (2024)

Koefisien determinasi variabel penerapan aplikasi SIMASET, pengelolaan BMD dan pengelolaan laporan keuangan daerah dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square = 0,964 (96,4%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan aplikasi SIMASET, pengelolaan BMD dan pengelolaan laporan keuangan daerah sebagai variabel independen mampu mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk sebesar 96,4% dengan estimasi kesalahan data sebesar 1,064 satuan data. Sedangkan sisanya sebesar 3,6 % menjelaskan secara empirik menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah

Kabupaten Nganjuk dipengaruhi oleh variabel lain selain penerapan aplikasi SIMASET, pengelolaan BMD dan pengelolaan laporan keuangan daerah. Sehingga besarnya nilai koefisien determinasi ini menunjukkan dampak yang sangat kuat jika ketiga variabel dapat diterapkan dalam pencapaian kualitas laporan keuangan.

Hasil Uji Parsial

Berdasarkan data yang dikumpulkan dengan menjumlah hasil penilaian responden yang bersedia menjadi sampel, maka dapat diketahui hasil uji hipotesis t-test yang akan dibandingkan dengan nilai t-tabel senilai 1,98260 didapat dari $df=N-K= 100-4= 96$ dengan toleransi sebesar 0,05, maka dapat dibuat penerimaan hipotesis sebagai hasil pengujian secara parsial sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

Model Penelitian	t- hitung	t-tabel	Sig.	Batas kesalahan	Keputusan
Penerapan Aplikasi SIMASET → Kualitas laporan keuangan	8,280	1,98260	0,000	0,050	Berpengaruh, signifikan, dan positif
Pengelolaan BMD → Kualitas laporan keuangan	6,037	1,98260	0,000	0,050	Berpengaruh, signifikan, dan positif
Pengelolaan Keuangan Daerah → Kualitas laporan keuangan	9,186	1,98260	0,000	0,050	Berpengaruh, signifikan, dan positif

Sumber: Data Diolah dari Output SPSS (2024)

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan $N =$ jumlah sampel $= 110$, $k =$ variabel penelitian $= 4$, maka $df : n-k = 110- 4 = 106$, sehingga t tabel $= 1,98260$ menunjukkan bahwa:

Variabel penerapan aplikasi SIMASET (X1) mempunyai nilai probabilitas mencapai $0,000 < 0,05$ dan t hitung sebesar $8,280 > 1,98260$. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwasannya H_0 ditolak dan H_1 diterima, dimana membuktikan bahwa adanya variabel penerapan aplikasi SIMASET memiliki pengaruh yang signifikan serta baik terhadap mutu laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk (Y).

Variabel pengelolaan BMD (X2) mempunyai nilai probabilitas mencapai $0,000 < 0,05$ dan t hitung mencapai $6,037 > 1,98260$ yang berarti hipotesis nol (H_0) ditolak serta hipotesis alternatif (H_2) diterima. Hal tersebut membuktikan bahwasannya Pengelolaan BMD (X2) mempunyai pengaruh signifikan secara parsial positif terhadap variabel terikat (Y) yakni mutu laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk (Y).

Variabel pengelolaan keuangan daerah (X3) memiliki nilai probabilitas mencapai $0,000$ kurang dari $0,05$. Selain itu, nilai t hitung mencapai $9,186$ lebih besar dari $1,98260$. Hasil tersebut membuktikan bahwasannya hipotesis nol (H_0) ditolak serta hipotesis alternatif (H_3) diterima. Dengan pemahaman lain pengelolaan keuangan daerah (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan dan parsial secara positif terhadap variabel terikat (Y) yakni mutu laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk (Y).

Pembahasan

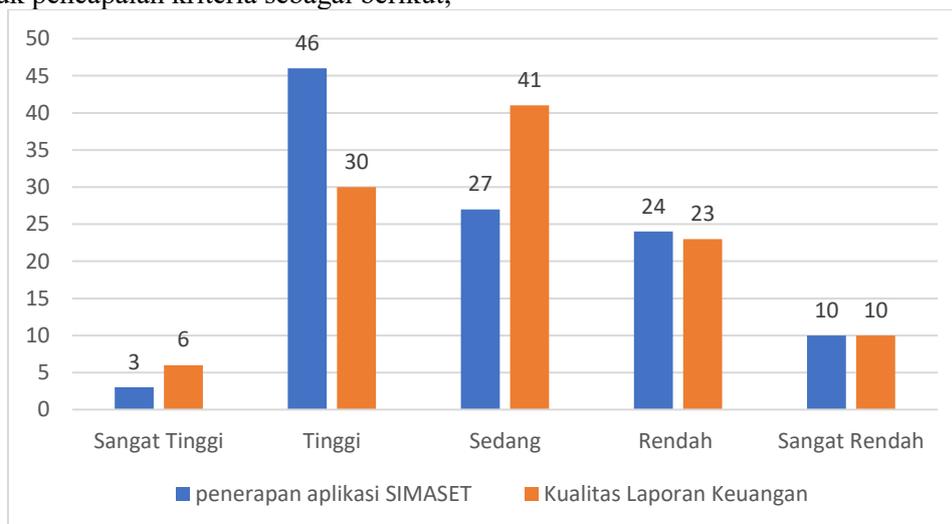
Penelitian ini bertujuan dalam menguji secara kuantitatif dalam mengetahui pengaruh penggunaan Aplikasi SIMASET terhadap mutu laporan keuangan daerah di

Kabupaten Nganjuk. Peneliti menerapkan teknik *purposive sampling* dalam mencari responden sebagai sampel dari para karyawan OPD di lingkup Kabupaten Nganjuk yang sudah berperan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah. Berikut hasil pembuktian penelitian.

Dampak Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (Simaset) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasar pada hasil pembuktian empiris membuktikan bahwasannya dari 110 responden telah menunjukkan bahwa adanya variabel penerapan aplikasi Sistem informasi manajemen aset (SIMAset) memberikan dampak baik serta signifikan terhadap mutu laporan keuangan daerah kabupaten Nganjuk. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil statistic uji t yang menunjukkan variabel penerapan aplikasi SIMASET (X1) mempunyai nilai probabilitas mencapai $0,000 < 0,05$ serta t hitung mencapai $8,280 > 1,98260$. Sehingga, adanya variabel penerapan aplikasi SIMASET mampu memberikan dampak pengaruh secara signifikan serta baik terhadap mutu laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.

Keterkaitan kedua variabel ini memiliki dampak yang kuat, terbukti dari nilai koefisien variabel dalam model regresi variabel penerapan aplikasi SIMASET bernilai positif terhadap tingkat pencapaian kualitas laporan keuangan. Dampak positif ini juga dapat di deksripsikan dari hasil pencapaian kriteria skor jawaban dari para responden yang dapat disajikan peneliti dari nilai rata-rata skor, nilai terendah dan nilai tertinggi sehingga terbentuk pencapaian kriteria sebagai berikut;



Gambar 3 Grafik Pencapaian Penerapan Aplikasi SIMASET terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwasannya semakin baik penerapan aplikasi SIMASET maka pencapaian kualitas laporan keuangan daerah dengan kriteria sangat tinggi juga akan meningkat. Meskipun dalam grafik terlihat tidak semua kriteria pencapaian kategori memberikan dampak yang sama. Tetapi adanya penerapan SIMASET tidak memberikan pengaruh yang buruk dalam pengelolaan keuangan. Karena dalam penerapan sebuah sistem harus dilakukan secara bertahap dan jangka Panjang dalam pemanfaatannya.

Hasil penelitian ini memiliki konsistensi temuan dengan (Sukma et al., 2023), di mana terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) serta manajemen aset tetap daerah terhadap penambahan mutu laporan keuangan pemerintah daerah. Begitu juga menurut (Fajri & Fuadi, 2021), penerapan Sistem

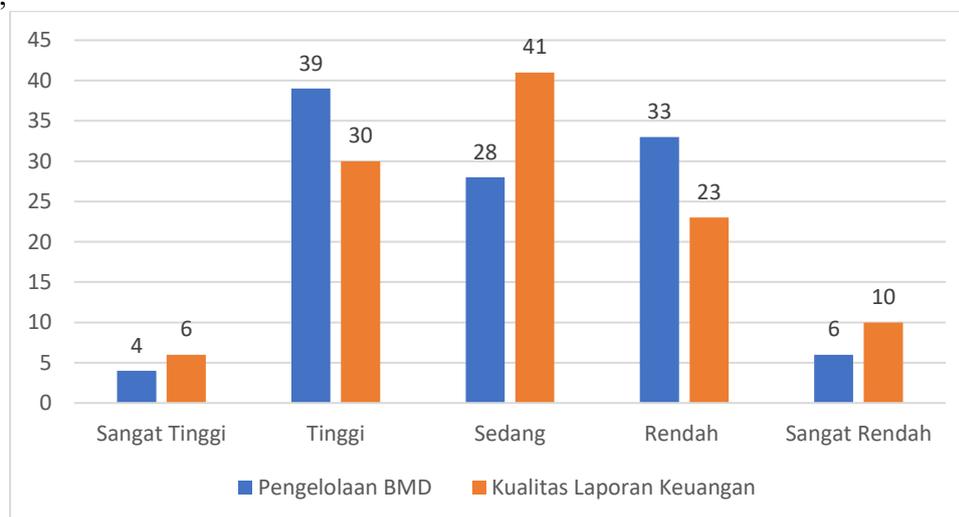
Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) memiliki dampak yang baik terhadap mutu laporan keuangan. Semakin optimal sistem aplikasi penerapan manajemen aset dalam mengelola barang milik negara atau daerah, maka makin bermutu juga laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan.

Sehingga diharapkan adanya penelitian ini mampu memberikan motivasi bagi karyawan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan memiliki akses dalam menggunakan aplikasi SIMASET untuk dapat memaksimalkan manfaat yang diharapkan guna mempermudah dan mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas inventarisasi pengelolaan aset dan pengawasan terkait pengaturan asset-aset yang dimiliki kabupaten dari desa hingga ke pusat pemerintahan.

Dampak Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasar pada hasil pembuktian empiris menunjukkan bahwa dari 110 responden telah menunjukkan bahwa adanya variabel pengelolaan barang milik daerah (BMD) memberikan dampak yang baik serta signifikan terhadap mutu laporan keuangan daerah kabupaten Nganjuk. Hal tersebut ditunjukkan melalui hasil statistik uji t yang menunjukkan variabel pengelolaan barang milik daerah (BMD) mempunyai nilai probabilitas mencapai $0,000 < 0,05$ serta t hitung mencapai $6,037 > 1,98260$ yang menunjukkan bahwa Pengelolaan BMD (X2) mempunyai pengaruh signifikan secara parsial positif terhadap variabel terikat (Y) yakni mutu laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk .

Keterkaitan kedua variabel ini memiliki dampak yang kuat, terbukti dari nilai koefisien variabel dalam model regresi variabel pengelolaan BMD bernilai positif terhadap tingkat mutu laporan keuangan. Dampak positif ini dapat dideksripsikan dari hasil pencapaian kriteria skor jawaban dari para responden yang dapat disajikan peneliti dari nilai rata-rata skor , nilai terendah dan nilai tertinggi sehingga terbentuk pencapaian kriteria sebagai berikut;



Gambar 4 Grafik Pencapaian Pengelolaan BMD terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dipahami bahwasannya dalam pencapaian sangat tinggi menunjukkan tingkat yang seajar, bahwa dalam pengelolaan BMD yang sangat baik akan mencapai level kualitas yang sangat baik juga. Sebaliknya jika pengelolaan aset yang menjadi sumber pendapatan daerah tidak dikelola atau memiliki pencapaian sangat rendah, maka dampak terhadap mutu laporan keuangan terlihat grafik yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwasannya, bagi pemerintah beserta para pengendali internal pengelolaan BMD harus dapat mengatur, memanfaatkan anggaran

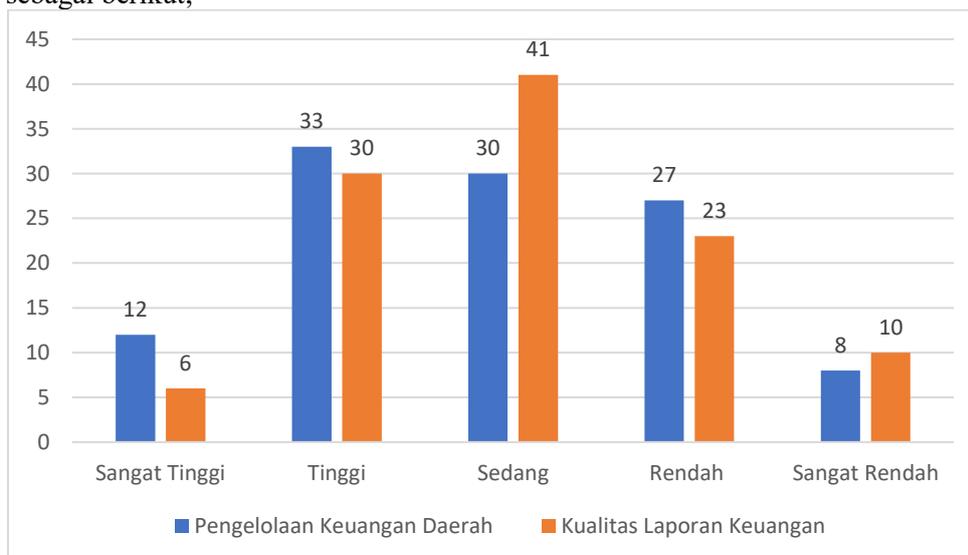
pengelolaan keuangan yang ada guna mendanai atau memaksimalkan aset-aset yang berpotensi meningkatkan pendapatan atau hanya sekedar merawatnya saja. Pemerintah harus bijak dan memiliki target dengan akurasi yang baik agar tidak melakukan pemborosan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mahmudi (2018:11), jika pengelolaan BMD dilakukan dengan strategi yang tepat, maka tidak akan menyebabkan in-efisiensi dalam pemborosan biaya pembelian dan pemeliharaan aset berlebihan dan akan mencapai target yang diharapkan secara maksimal. Hal inilah yang membuat pentingnya pengelolaan BMD demi menekan pembelanjaan daerah yang boros (Firzada, 2021). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan dari (Poa et al., 2023), di mana manajemen Barang Milik Daerah (BMD), yang mencakup aspek penilaian, administrasi, pengendalian, dan pengawasan, berdampak baik serta signifikan terhadap mutu laporan keuangan Pemerintah Daerah. Semakin efektif pengelolaan BMD, makin tinggi mutu laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaporkan, baik kepada BPK maupun kepada masyarakat luas.

Dampak Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pembuktian empiris membuktikan bahwasannya dari 100 responden telah membuktikan bahwasannya adanya variabel pengelolaan keuangan daerah memberi dampak yang baik serta signifikan terhadap mutu laporan keuangan daerah kabupaten Nganjuk. Hasil tersebut bisa ditunjukkan melalui hasil statistik uji t yang menunjukkan variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai mencapai 0,000 kurang dari 0,05. Selain itu, nilai t hitung mencapai 9,186 lebih besar dari 1,98260. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah (X3) mempunyai dampak pengaruh yang signifikan dan parsial secara positif terhadap variabel terikat (Y) yakni mutu laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.

Keterkaitan kedua variabel ini memiliki dampak yang kuat, terbukti dari nilai koefisien variabel dalam model regresi variabel pengelolaan keuangan daerah bernilai positif terhadap tingkat mutu laporan keuangan. Dampak positif ini juga bisa dideksripsikan dari hasil pencapaian kriteria skor jawaban dari para responden yang dapat disajikan peneliti dari nilai rata-rata skor, nilai terendah dan nilai tertinggi sehingga terbentuk pencapaian kriteria sebagai berikut;



Gambar 5 Grafik Pencapaian Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasar pada grafik tersebut, diketahui bahwasannya dalam pengelolaan kualitas daerah belum mencapai level sangat tinggi tetapi kualitas laporan keuangan sudah mencapai kriteria sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil nilai konstanta dalam model regresi yang menunjukkan nilai positif tanpa adanya dampak dari variabel independent. Berdasarkan grafik juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Nganjuk yang tinggi memberikan dampak kualitas dengan pencapaian yang lebih tinggi, Sedangkan dengan pengelolaan yang rendah juga akan menurunkan sedikitnya pencapaian kualitas laporan keuangan, meskipun dampak yang diberikan dari grafik dalam menurunkan level kualitas tidak terlalu drastic tetapi pengelolaan yang sangat rendah/buruk juga akan berdampak pada penurunan kualitas.

Hasil studi ini sejalan dengan temuan dari (Baso et al., 2023), adanya pengelolaan keuangan daerah memberi sumbangsih pada upaya dalam menambah mutu laporan keuangan daerah. Menurut (Slamet & Irmadiani, 2022), pengelolaan keuangan daerah memberikan dampak baik terhadap mutu laporan keuangan tersebut. Ini menegaskan bahwasannya makin optimal pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah serta pengelolaan keuangan yang dilakukan, makin baik juga mutu laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Berdasar pada hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada semua OPD yang ikut serta dalam proses pengelolaan keuangan khususnya BPKAD Kabupaten Nganjuk harus dapat Menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang baik demi mencapai realisasi sesuai yang anggaran dan target pencapaian yang maksimal. Sehingga tidak ada in-efisiensi dalam penganggaran dana yang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal guna menghasilkan pendapatan daerah lebih baik.

Kesimpulan

Sebagaimana hasil analisis pembuktian secara statistik, maka dapat peneliti tunjukkan kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Terbukti secara empirik adanya penerapan aplikasi SIMASET berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.
2. Terbukti secara empirik adanya pengelolaan barang milik daerah (BMD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Terbukti secara empirik adanya pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Terbukti secara simultan adanya ketiga variabel penerapan aplikasi SIMASET, pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dengan sangat kuat.

Daftar Pustaka

- Baso, N. A., Umar, F., & Nohong, M. (2023). The Influence of Regional Financial Management And Regional Financial Accounting Systems With Information Technology As Moderation Variables On The Quality Of Regional Financial Reports. *Journal of Research in Business and Management*, 11(6), 44–52. <https://www.questjournals.org/jrbm/papers/vol11-issue6/11064452.pdf>
- Fajri, A. M., & Fuadi, R. (2021). Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Kantor Kementerian Negara / Lembaga Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(2), 192-201. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/185>.

- Firzada, M. I. (2021, August 26). Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional. *Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-biak/baca-artikel/14179/Perspektif-Pengelolaan-Barang-Milik-Daerah-BMD-Sebagai-Modal-Awal-Pembangunan-Nasional.html>
- Lestari, K., & Yadiati, W. (2022). The Influence of Regional Financial Management Information System (SIPKD) and Fixed Asset Management on the Quality of Local Government Financial Reports in City and Regency Regional Governments in West Java Province. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 2(6), 790–804. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku1288>
- Leunupun, P., Persulesy, G., & Souhuwat, M. Y. (2022). Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner*, 6(3), 1364–1376. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.884>
- Lisdamayanti, Aqsa, M., & Risal, M. (2022). Implementation Of The Regional Financial Management Information System On The Quality Of Financaial Reports (Study on the Regional Asset and Financial Management Agency of the City of Palopo). *Jurnal Mantik, SINTA 4*, 6(1), 25-29 <https://iocscience.org/ejournal/index.php/ma>.
- Mahmudi, A. (2018). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Marfuah, M., Istiqomah, E. N., Ayuntari, C. G., & Prasetyo, P. P. (2023). Determinants of quality of the financial statements of Gunung Kidul Regency Government. *Journal of Contemporary Accounting*, 5(1), 12–27. <https://doi.org/10.20885/jca.vol5.iss1.art2>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Patty, M. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Budaya Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kepemimpinan Transformasional sebagai Pemediasi. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01(1), 66–82.
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). *PP Nomor 56 Tahun 2005 SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH*. 17–19.
- Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. D. (2023). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 19–27. <https://doi.org/10.59963/jpema.v5i1.130>
- Pramesti, N. D., & Damajnti, A. (2020). Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 179–188. <https://doi.org/10.37932/ja.v8i2.75>
- Purnomo, R. S., Saragi, F. K., Syafiq, M., Oktaviani, D., Hermawan, R., Larasati, I. K., & Suryana, Y. (2020). *Kajian Reformulasi Dimensi Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sanri)*. Jakarta Pusat: LAN RI. <http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2021/07/5.-Kajian-Sanri-25-Januari-2021.pdf>
- Slamet, B., & Irmadiani, N. D. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor). *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 67. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2792>

Sukma, A. M., Hidayat, A. I., & Susanty, A. (2023). Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Aspek Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(2), 239–252. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.02.20>

Yudistira, & Rohman, A. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD di Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan 2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809-820 <http://eprints.ipdn.ac.id/14976/1/MUHAMMAD>.